

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Luas hutan bakau (mangrove) yang terdapat di Kecamatan Bintan Timur 4.459,29 ha , terdiri dari : tambak seluas 2 ha, izin HPHH untuk panglong arang 1.100 ha dan hutan mangrove seluas 3.357,29 ha. Ekosistem mangrove dimanfaatkan oleh masyarakat berupa pemanfaatan dari hasil penangkapan kepiting dan hasil dari produksi tambak udang, kayu bakau untuk diolah jadi arang dan kayu bakar.
2. Tingkat kepuasan (*utility*) terbesar dari ekosistem mangrove di Kecamatan Bintan Timur diperoleh dari hasil penangkapan kepiting yaitu Rp 13.647.959 dan surplus konsumen sebesar Rp 27.780.612 per hektar per tahun.
3. Nilai manfaat langsung optimal yang paling besar adalah dari jenis pemanfaatan tambak udang yaitu Rp 64.259.987 per ha tetapi keuntungan optimal tambak adalah yang terendah yaitu Rp (424.829) per ha. Keuntungan optimal tertinggi diperoleh dari jenis pemanfaatan kayu bakau untuk bahan baku arang sebesar Rp 360.732 per hektar per tahun.
4. Nilai manfaat langsung aktual yang tertinggi diperoleh dari jenis pemanfaatan kayu bakau untuk bahan baku arang dengan keuntungan Rp 329.818.000 dengan luas lahan 1.100 ha. Keuntungan aktual yang paling rendah diperoleh dari jenis pemanfaatan tambak udang Rp (18.315.175) dengan luas tambak 2 ha.

5. Nilai ekonomi total ekosistem mangrove di Kecamatan Bintan Timur yang dimanfaatkan untuk tambak seluas 2 ha, izin HPHH untuk panglong arang 1.100 ha dan hutan mangrove seluas 3.357,29 ha adalah Rp 135.977.965.849 per tahun. Nilai manfaat ekosistem mangrove tertinggi berupa manfaat tidak langsung yaitu Rp 116.375.900.400 per tahun atau 85,58 % dari nilai ekonomi total, nilai manfaat langsung sebesar Rp 1.167.918.000 per tahun, nilai manfaat keberadaan Rp 17.837.160.000 per tahun dan nilai manfaat pilihan Rp 596.987.449 per tahun.
6. Berdasarkan analisis *benefit cost ratio* terhadap alternatif pemanfaatan ekosistem mangrove di Kecamatan Bintan Timur, diperoleh nilai NPV dan BCR tertinggi pada tingkat suku bunga 10 % untuk alternatif pemanfaatan III.
7. Berdasarkan nilai NPV dan BCR untuk kriteria efisiensi, pemerataan pendapatan untuk kriteria *equity* (sosial) dan perubahan luas ekosistem mangrove untuk kriteria ekologi (*sustainable*) setelah distandarisasi, ternyata alternatif pemanfaatan III memberikan nilai paling tinggi.
8. Prioritas pertama pemanfaatan ekosistem mangrove di Kecamatan Bintan Timur adalah alternatif pemanfaatan III. Prioritas kedua adalah alternatif pemanfaatan II. Alternatif pemanfaatan I tidak dimasukkan sebagai prioritas dalam pengelolaan hutan mangrove karena pemanfaatan lahan mangrove untuk tambak ternyata tidak menguntungkan.

5.2. Saran

1. Pemberian izin HPHH pada pengusaha panglong perlu dibatasi mengingat intensitas penebangan pohon bakau di lokasi penelitian cukup tinggi.
2. Rata-rata kepadatan hutan mangrove di daerah penelitian relatif rendah dan sebahagian besar hutan bakau mengalami kerusakan yang cukup parah, maka

rehabilitasi mangrove perlu dilaksanakan di Kecamatan Bintan Timur,di samping itu perlu diselidiki faktor-faktor penyebab kerusakan ekosistem mangrove di daerah tersebut.